

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Wibowo (2012), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 1984 – 2009”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan alat analisis regresi linier dengan metode *Ordinary Least square (OLS)*. Menyatakan hasil penelitian bahwa variable jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Grobogan pada derajat kepercayaan 95% serta variable pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Grobogan pada derajat kepercayaan 95%.

Wasingah(2018), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015”. Metode analisis yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan analisis data panel. Mengatakan bahwa hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, variable kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, variable inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dan variable jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi kelima variable berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 99.92% sementara untuk sisanya yaitu 0.08% dijelaskan oleh variable lainnya.

Luh Putu Rani Mayasari Ni Kadek Sinarwati(2012), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng”.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan alat analisis Regresi Linier. Untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Alokasi Belanja Modal dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari tahun 2011-2013 berupa Laporan Realisasi Anggaran dengan sumber Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Buleleng. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Setiyawati (2013), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan alat analisis Regresi Linier. Pengaruh daerah asli pendapatan, DAU, DAK dan belanja modal pada pertumbuhan ekonomi; untuk memeriksa secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran; dan untuk memeriksa secara tidak langsung efek pendapatan asli daerah, alokasi dana umum, alokasi dana khusus, dan belanja modal untuk kemiskinan dan pengangguran. Dalam penelitian yaitu biaya daerah dan anggaran pendapatan daerah pada tahun 2001 - 2005 di tiga puluh delapan kota. Hasil dari penelitian dengan regresi di indikasikan bahwa Pendapatan asli daerah dan alokasi general fund memiliki efek langsung yang signifikan pada tingkat 0,01 pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki efek signifikan secara langsung pada tingkat 0,01 pada kemiskinan, dan pengangguran, pendapatan asli daerah dan alokasi dana umum secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses untuk meningkatkan pendapatan tanpa mengkaitkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk yang pada umumnya sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan bertambah pada suatu pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya pada satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun pada jasa dalam kurung waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor sumber daya manusia, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor sumber daya alam, faktor budaya dan faktor sumber daya modal.

Masalah yang di hadapi oleh pemerintah sangatlah besar karena harus menangani masalah kemiskinan yang ada di Indonesia terutama pada daerah-daerah yang terpencil dan bisa menyebabkan kemiskinan yang relative tinggi. Dan seharusnya pemerintah harus bisa mengambil kebijakan yang tegas untuk bisa menangani masalah kemiskinan. Pada tingkat kemiskinan yang tinggi akan terjadi rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah karena terjadinya estasis per kapita juga akan mengakibatkan penurunan atau rendah. Negara sangatlah berpengaruh terhadap suatu syarat utama dalam penurunan kemiskinan yang tetap pada suatu pertumbuhan ekonomi. Pengangguran yang semakin meningkat maka akan membuat kemiskinan yang meningkat sedangkan apabila upah riil semakin meningkat maka akan menurunkan jumlah kemiskinan. Oleh sebab itu peran pemerintah sangatlah penting untuk meningkatkan upah riil yang di butuhkan, sehingga masalah kemiskinan bisa teratasi masalahnya pada setiap tahunnya.

Todaro (2000), tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi

penduduk ataupun masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi hidupnya. Dalam tolak ukur keberhasilan pembangunan dilihat dari struktur ekonomi dan semakin kecil ketimpangan pendapatan antar penduduk, pertumbuhan ekonomi, antar daerah dan antar sektor. Pembangunan dalam lingkup negara secara tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah sering menjadi suatu permasalahan serius. Di beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara di beberapa daerah pertumbuhannya mengalami keterlambatan.

Daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama karena sumber yang telah dimiliki sangat berbeda, kecenderungan peranan modal (*investor*) memilih perkotaan atau daerah yang memiliki sarana atau fasilitas yang memiliki hubungan dengan adanya aliran listrik, aliran telekomunikasi, perbankan, asuransi dan tenaga kerja yang terampil serta adanya ketimpangan dalam suatu distribusi, pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Adapun perbedaan pada tingkat pembangunan akan membawa dampak pada tingkat kesejahteraan antar daerah bisa menyebabkan ketimpangan antar daerah yang semakin besar. Suatu negara mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan suatu pembangunan ekonomi, indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi maka negara tersebut bisa melakukan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik pada saat periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dapat diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dan indikasi keberhasilan dalam pembangunan ekonomi untuk kehidupan masyarakat. Hal ini karena negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi dua masalah yang besar, yaitu pada kesenjangan ekonomi atau ketimpangan.

Prayitno, 1986 dalam Damarjati (2010), masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang yang mempunyai suatu masalah dalam menentukan strategi dasar pembangunan

yaitu pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan. Ada pendapat dari pakar ekonomi tentang pendapatnya tentang adanya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi makasud tidak dapat dipakai untuk mengurangi kemiskinan, sementara kemiskinan adalah realita dalam kehidupan ekonomi pada negara yang sedang berkembang. Berbanding terbalik pada negara yang berkembang pada negara yang maju sangat bisa untuk meningkatkan pendapatan merupakan tujuan penting dari suatu segala kegiatan ekonomi. Pada saat tingginya ekonomi di suatu daerah tidak menjamin pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat tetap dianggap suatu strategi yang unggul dalam suatu pembangunan ekonomi.

Arsyad (2010), dalam proses pembangunan ekonomi pada suatu daerah akan mengalami pertumbuhan dan perubahan struktural ekonomi. Pada karakteristik suatu kondisi daerah yang sangat beragam dan berbeda-beda suatu wilayah atau daerah yang mengalami pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam suatu pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi dari berbagai kebijakan, suatu program untuk meningkatkan otonomi daerah yang luas pada daerah. Dalam suatu kebijakan otonomi daerah akan memberikan kesempatan besar pada daerah untuk merumuskan dan memberikan tujuan dari pembangunan daerah untuk menjaga makna keberadaan dalam sebuah system pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan pada daerah mempunyai tujuan yang paling penting untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuannya yaitu pemerintah daerah dan masyarakat harus selalu bersama untuk mengambil dampak positif dalam pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah harus mempunyai potensi pada setiap sumber daya yang akan diperlukan untuk suatu perencanaan dalam membangun perekonomian di daerah.

Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah rendahnya daya saing sumber daya manusianya. Pada suatu perkembangan ekonomi selalu mengacu pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan *output* daerah yang mempunyai fungsi dari faktor produksi dan fungsi produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka akan mendistribusikan pendapatan rumah tangga dalam suatu faktor produksi mengalami perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah faktor produksi yang turut serta menciptakan pendapatan daerah tersebut. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas factor produksi dan semakin tinggi pula upah yang akan diterima oleh pekerja. Menurut Sukirno (1996), pertumbuhan dan pengembangan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Maka dengan demikian semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dikatakan dengan berhasil jika menggunakan ukuran dari beberapa indikator yang lazim yang digunakan sebagai salah satu alat ukur. Indikator yang lazim yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum yang dapat dilihat sebagai ukuran kemajuan untuk suatu daerah.

Pada proses pembangunan terjadi dilemma yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, masalah yang harus dihadapi oleh negara miskin dan berkembang. *Trade off* atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan pada masing-masing daerah selalu terjadi. Kuznet telah mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dengan kata lain ketimpangan yang tinggi, namun pada tahap berikutnya hal tersebut akan membaik. Menurut Kuznet, pada distribusi pendapatan akan meningkat jika sejalan dengan pertumbuhan

ekonomi (Todaro,2003). Dengan adanya penelitian menurut Sutarno dan Kuncoro (2003) mengatakan tentang hipotesis Kuznets mengenai ketimpangan yang berbentuk kurva U terbalik belaku pada suatu daerah tertentu. Sedangkan menurut Imani (2013) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan angka partisipasi kasar mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk membangun perkembangan dan kemajuan perekonomian di suatu daerah, wilayah dan negara. Karena saling berhungan satu sama lain dengan keaktifitasan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dalam hal tersebut untuk meningkatkan tingkat produksi atau jasa, yang mampu memberikan *trickledown effect* yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang meningkat bisa menjadi target untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di tingkat daerah dan nasional. Dalam pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto rill sedangkan pada tingkat nasioanal digunakan Produk Domestik Bruto rill.

Kegiatan pembangunan yang diarahkan kepembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai tingkat kemiskinan yang terus naik dari tahun ketahun. Pembangunan daerah memiliki kesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah di tetapkan untuk pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Oleh sebab itu indicator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Efektifitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin yaitu mempunyai strategi pembangunan. Kriteria dalam pemilihan sector mempunyai titik berat atau sektor pembangunan ekonomi nasional adalah efektifitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan khusus didalam bidang ekonomi. Pertumbuhan merupakan gabungan laju

pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor ekonomi yang menggambarkan tingkat perkembangan ekonomi yang telah terjadi. Dalam melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ketahunnya. Yang disajikan melalui PDRB dengan harga konstan menurut lapangan usaha secara berkala atau bertahap. Pertumbuhan ekonomi yang positif sangat menunjukkan adanya peningkatan dalam perekonomian maka dengan sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi negatif maka menunjukkan dalam sebuah penurunan. Pada tahun 2001-2012 dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan sebesar 4,52 persen pertahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,16 persen setelah tahun 2011 akan memperlambat pertumbuhan sebesar 3,59 persen sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 2,20 persen.

2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Pusat kesetiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang ada di Indonesia pada tiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU adalah suatu komponen belanja pada APBN dan telah menjadi komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum dapat dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Dari jumlah keseluruhan DAU yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan telah ditetapkan didalam APBN. Dana Alokasi Umum memiliki sifat *Block Grant* yang artinya penggunaan dapat diserahkan kepada daerah yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di dalam dasar hukum Dana Alokasi Umum yaitu UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam alokasi Dana Alokasi Umum yaitu Dana Alokasi Umum dapat dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dan

proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Kebutuhan fiskal dalam Dana Alokasi Umum dapat mengukur dengan menggunakan variabel dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia sedangkan kapasitas fiskal dapat diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Alokasi dapat dihitung dengan berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Data yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum diperoleh dari Lembaga Statistik Pemerintah atau Lembaga Pemerintah yang berwenang dalam menerbitkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam suatu data yang dimaksud tidak tersedia, maka data tersebut dapat digunakan adalah data dasar penghitungan Dana Alokasi Umum pada tahun sebelumnya. Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Kondisi penerimaan Dana Alokasi Umum berdasarkan nilai celah fiskal :

- a. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari nol, maka akan menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar yang telah ditambah celah fiskal.
- b. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol, maka akan menerima Dana Alokasi Umum yang memiliki besar adalah alokasi dasar.
- c. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut akan lebih kecil dari alokasi dasar, maka akan menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar yang telah diperhitungkan dengan nilai celah fiskal.
- d. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka tidak akan menerima Dana Alokasi Umum.

Formulasi Dana Alokasi Umum di bagi menjadi 3 yaitu :

1. Formula Dana Alokasi Umum merupakan pendekatan pada celah fiskal (*fiscal gap*) yang memiliki selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) akan mengurangi kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar yang berupa jumlah gaji PNS di daerah.

Rumus :

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan :

AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal-Kapasitas Fiskal

2. Variabel Dana Alokasi Umum merupakan komponen variabel dalam kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang dapat digunakan untuk pendekatan dalam perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari : jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita. Dalam komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.
3. Metode Perhitungan Dana Alokasi Umum dibagi menjadi dua yaitu :
 - a. Alokasi Dasar yaitu Besaran Alokasi Dasar yang dihitung berdasarkan realisasi gaji PNS Daerah pada tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat yang telah sesuai dalam peraturan pengajian PNS yang telah berlaku.
 - b. Celah Fiskal yaitu suatu alokasi berdasar dengan celah fiskal pada suatu daerah yang dapat dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal pada daerah yang

bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi Dana Alokasi Umum CF nasional. CF pada suatu daerah dapat dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengan KpF.

2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai suatu kegiatan khusus berupa urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam rancangan suatu APBN. Dasar hukum yang berlaku pada Dana Alokasi Khusus yaitu Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomer 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Keuangan ke Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Perhitungan Dana Alokasi Khusus ada dua tahapan yaitu penentuan daerah tertentu yang dapat menerima Dana Alokasi Khusus dan penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus dalam masing-masing daerah. Dalam suatu penentuan pada daerah tertentu yang akan menerima Dana Alokasi Khusus harus memiliki kriteria umum, khusus dan teknis. Dalam mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus memiliki kriteria yaitu :

- a. Kriteria Umum, dapat dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang di cerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Keuangan daerah dapat dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum di daerah tertentu yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
- b. Kriteria Khusus, dapat dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Melalui indeks

kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri atau pimpinan lembaga yang terkait.

c. Kreteria Teknis,dapat disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Melalui indeks teknis oleh menteri yang terkait dan yang dimaksud adalah kepada Menteri Keuangan. Arah kegiatan Dana Alokasi Khusus yaitu:

- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Pendidikan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Kesehatan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Infrastruktur Jalan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Infrastruktur Irigasi
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Infrastruktur Air Minum
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Infrastruktur Sanitasi
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Prasarana Pemerintahan Desa
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Kelautan dan Perikanan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Pertanian
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Keluarga Berencana
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Kehutanan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Sarana Perdagangan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Energi Perdesaan
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Perumahan dan Permukiman
- Dana Alokasi Khusus didalam Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Dalam dana pendamping di daerah penerima Dana Alokasi Khusus wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai Dana Alokasi

Khusus yang akan diterima untuk mendanai kegiatan fisik. Dalam dana tersebut wajib dianggarkan dalam APBD di tahun anggaran berjalan. Optimalisasi dan sisa Dana Alokasi Khusus di bagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Daerah yang telah menerima Dana Alokasi Khusus dapat melakukan suatu penggunaan Dana Alokasi Khusus dengan perencanaan dan menyelenggarakan kembali suatu kegiatan Dana Alokasi Khusus dalam APBD, pada saat optimalisasi dilakukan dengan kegiatan di bidang Dana Alokasi Khusus yang sama yang telah sesuai dengan petunjuk teknis.
2. Dalam mendapatkan sisa Dana Alokasi Khusus pada kas daerah saat tahun anggaran sudah berakhir maka daerah tersebut dapat menggunakan sisa Dana Alokasi Khusus tersebut untuk mendanai kegiatan Dana Alokasi Khusus di bidang yang sama pada tahun anggaran yang berikutnya.

2.2.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan yang meningkatkan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Gejala pada umumnya yang ditimbulkan oleh kenaikan jumlah uang beredar maka akan menyebabkan adanya kenaikan harga. Dalam laju inflasi pada umumnya dapat dinyatakan kedalam angka persentase. Laju inflasi sendiri dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat dan hiperinflasi.

Kebijakan dalam pembangunan berdasarkan kepada keyakinan bahwa inflasi akan menimbulkan berbagai akibat yang buruk terhadap masyarakat tetapi dapat menghambat laju pembangunan. Pada abad 1980-an ada beberapa negara yang tidak berusaha menghindari masalah inflasi dalam membangun perekonomian. Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa inflasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dielakan dalam proses pembangunan. Pembangunan ekonomi yang telah berlangsung di negara maju maupun negara berkembang tidak memberikan gambaran yang seragam mengenai kaitan antara inflasi dan pembangunan

ekonomi. Di beberapa negara inflasi yang relatif cepat diikuti dengan pertumbuhan yang lambat. Sedangkan di beberapa negara lain pembangunan ekonomi yang cepat terjadi di dalam masa inflasi. Juga, pembangunan ekonomi di beberapa negara menunjukkan bahwa adakalanya perkembangan ekonomi yang cepat diikuti oleh inflasi dan adakalanya oleh kestabilan harga-harga. Sebaliknya, dalam masa perkembangan yang lambat, ada negara yang mengalami inflasi dan ada pula negara yang tidak mengalami inflasi. Inflasi merupakan suatu kenaikan pada harga sejumlah barang dan jasa hanya harga dari satu jenis barang atau jasa. Inflasi menyangkut harga sejumlah barang dan jasa, dalam perhitungannya inflasi tidak sesederhana menghitung kenaikan satu jenis barang atau jasa. Dalam perekonomian yang cukup berkembang dan barang serta jasa yang dikonsumsi masyarakat sangat bermacam-macam, maka perhitungan inflasi sangatlah kompleks. Mengingat laju inflasi harus mencerminkan perubahan harga dari sejumlah barang dan jasa. Pada umumnya laju inflasi dapat dihitung dengan menggunakan angka yang indeks. Laju inflasi dapat dihitung dengan cara yang berbeda-beda. Laju inflasi pada umumnya dan secara luas di masyarakat adalah laju inflasi dalam menghitung perubahan harga barang dan jasa yang telah dikonsumsi di masyarakat dan sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK).

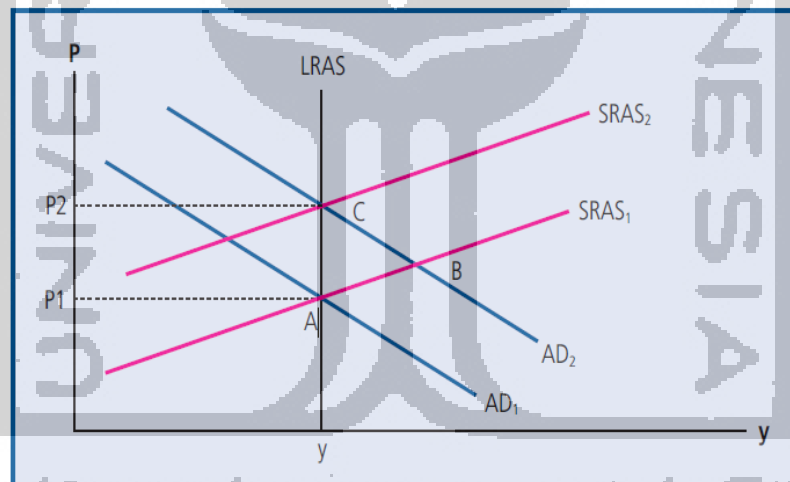
Dalam menghitung angka laju inflasi dapat diperhitungkan dengan adanya angka indeks menggunakan sejumlah barang dan jasa yang dapat diperhitungkan. Angka indeks berbeda dengan satu negara ke negara yang lainnya dan dari waktu ke waktu dalam suatu negara tertentu yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi konsumen atau masyarakat yang bersangkutan. Yang dapat menghitung selain IHK, inflasi dapat dihitung berdasarkan Indeks Biaya Hidup (IBH), Indeks Harga Produsen (IBP), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau dengan cara menghitung dengan deflator Produk Domestik Bruto (PDB deflator). Dari berbagai jenis angka indeks yang akan digunakan dalam suatu perhitungan dengan besarnya berbagai jenis laju inflasi disebut dengan perhitungan angka IHK. Dalam

suatu perhitungan inflasi akan memiliki tujuan yang berbeda. Dalam inflasi dengan menggunakan teori kuantitas maka tidak hanya menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar sebagai penyebab perubahan tingkat harga. Teori ini juga berkaitan dengan proporsionalitas jumlah uang dengan tingkat harga, mekanisme transmisi moneter, netralitas uang dan teori moneter tentang tingkat harga. Ahli ekonomi yang beraliran monetaris adalah ekonom Milton Friedman yang mendapatkan penghargaan Nobel pada bidang ekonomi pada tahun 1976. Pada teori permintaan uang menyatakan bahwa permintaan uang di masyarakat dapat ditentukan dengan jumlah variabel ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan tingkat harga. Dalam teori permintaan uang, tingkat harga atau laju inflasi akan berubah apabila jumlah uang yang beredar tidak sesuai dengan jumlah yang diminta atau yang diperlukan oleh suatu perekonomian. Dan apabila jumlah uang yang beredar lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat dan bisa menyebabkan inflasi. Sedangkan jumlah uang yang beredar lebih kecil dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat maka tingkat harga akan turun dan akan menyebabkan deflasi.

Dalam teori Keynes mengatakan bahwa teori kuantitas yang telah diasumsikan elastisitas dan perputaran uang (*velocity of circulation*) adalah tetap atau tidak benar. Elastisitas dan perputaran uang sangat sulit di prediksi dan mempengaruhi suatu ekspektasi masyarakat serta perubahan barang yang merupakan substitusi uang (*financial assets*). Hal ini dapat di buktikan dengan adanya suatu perekonomian yang sektor keuangannya telah melaju dan terdapat instrumen keuangan yang berfungsi sebagai substitusi uang, maka perputaran uang akan menjadi lebih sulit diprediksi. Pendapat menurut aliran keynesian tentang inflasi adalah suatu gejala moneter dalam berbagai kajian yang di pelapori oleh Friedman (1963) dan dalam waktu jangka panjang memiliki keterkaitan yang erat antara inflasi dan jumlah uang yang beredar. Yang mempengaruhi faktor inflasi yaitu dari sisi permintaan, sisi

penawaran maupun ekspektasi. Dalam inflasi permintaan mempunyai dua variabel yaitu permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah jumlah keseluruhan pada kebutuhan konsumsi dan investasi kedalam suatu perekonomian sedangkan penawaran agregat adalah seluruh potensi yang telah dimiliki oleh perekonomian yang menghasilkan barang dan jasa bersangkutan. Penggunaan permintaan dan penawaran agregat dapat digambarkan yang terjadinya kenaikan tingkat harga umum disebut dengan inflasi. Digrafik 1 perekonomian dalam tingkat keseimbangan waktu jangka panjang yang digambarkan pada titik Y^* merupakan kurva permintaan agregat (AD_1) berpotongan dengan kurva penawaran agregat (penawaran dalam waktu jangka pendek ($SRAS_1$) maupun penawaran waktu jangka panjang ($LRAS$)) pada titik A.

Gambar 2.1 Permintaan dan Penawaran



Sumber : Bank Indonesia, 2009

Dalam waktu jangka panjang penawaran agregat dianggap tetap karena seluruh kapasitas produksi telah digunakan. Pada titik tersebut tingkat harga terjadi pada tingkat P_1 . Apabila jumlah uang yang beredar bertambah maka jumlah permintaan agregat akan bertambah sehingga kurva permintaan agregat akan bergeser kekanan dan menjadi AD_2 . Dalam waktu jangka pendek perekonomian akan bergeser pada titik B akan tetapi pada titik

tersebut perekonomian telah melampaui kapasitas yang tersedia. Maka kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri menjadi SRAS₂ sampai pada keseimbangan semula dan akan berhenti pada titik C. Keseimbangan baru di tingkat harga akan meningkat dan tercapai di titik P₂. Apabila pada pertambahan uang beredar terus berlanjut maka akan terjadi kenaikan harga di titik P₃, P₄ dan seterusnya, dan *output* tidak akan bertambah besar. Dalam kondisi ini bahwa inflasi akan terjadi sehingga pertambahan jumlah uang yang beredar. Dalam inflasi penawaran menyebabkan inflasi yang sering ditimbulkan sebagai *cost push* atau *supply shock inflation*. Di karenakan inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya suatu produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga penawaran atas suatu barang termasuk barang impor serta harga barang yang dikendalikan oleh Pemerintah. Interaksi antara penawaran dan agregat merupakan suatu jumlah permintaan agregat yang telah melebihi suatu penawaran agregat maka harga-harga akan meningkat. Dapat digambarkan persamaan sebagai berikut : $P = D/S$. Apabila P adalah harga sedangkan D dan S adalah permintaan dan penawaran agregat. Maka P akan naik selama jumlah D lebih besar dibandingkan dengan jumlah S. Hal ini bisa terjadi apabila D yang meningkat sedangkan S tetap atau kenaikan S tidak sebanding dengan kenaikan D. Hal serupa bisa terjadi apabila S berkurang sedangkan D tetap atau penurunan D tidak akan sebanding dengan penurunan S. Dalam sisi permintaan dan penawaran memiliki kesamaan dalam sebuah kenaikan tingkat harga *output* akan tetapi hal ini mempunyai dampak yang sangat berbeda terhadap *volume output (PDB riil)*.

Dalam inflasi ekspektasi di dalam penawaran dan penerimaan memiliki ekspektasi dari para pelaku ekonomi atau sering disebut dengan inflasi ekspektasi (Gordon, 2007). Inflasi ekspektasi ini sangat berperan penting dalam suatu pembentukan harga dan upah tenaga kerja. Inflasi ekspektasi memiliki sifat adaptif (*backward expectation*) dapat mempengaruhi dalam berbagai hal yaitu inflasi permintaan yang persisten di masa lalu, inflasi penawaran

yang besar atau sering terjadi dan inflasi penawaran yang diperkuat oleh kebijakan moneter yang akomodatif. Untuk mengurangi dampak ekspektasi inflasi adaptif perlu adanya peningkatan kebijakan dari bank sentral. Bank sentral dapat menurunkan ekspektasi inflasi berdasarkan dalam kondisi ekonomi di masa yang akan datang (*forward looking*). Inflasi ini berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan luar negeri (*imported inflation*). Dampak inflasi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa maka nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang akan semakin lemah. Penurunan daya beli berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Inflasi yang tidak menentu dan tak terkendali disebut dengan hiperinflasi adalah suatu keadaan dalam laju inflasi dapat meningkatkan ratusan atau ribuan persen dari waktu tertentu, hal ini sangat berbahaya bagi suatu perekonomian. Dalam khusus hiperinflasi dimasyarakat atau individu akan melakukan pembelanjaan uangnya sampai habis atau menukarkan dengan mata uang yang lebih stabil sebelum harganya akan meningkat. Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode bulanan, kuartal dan tahunan. Pada tingkat inflasi dapat dihitung dengan IHK yang dapat membandingkan IHK pada tahun dasar dengan IHK periode pengamatan. IHK dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} \cdot Q_{0,i}}{\sum_{i=1}^k P_{0,i} \cdot Q_{0,i}} \times 100$$

Dimana :

I_n = Indeks periode ke-n

P_{ni} = Harga barang ke-i pada periode ke-n

$P_{(n-1)i}$ = Harga jenis barang ke-i pada periode ke-(n-1)

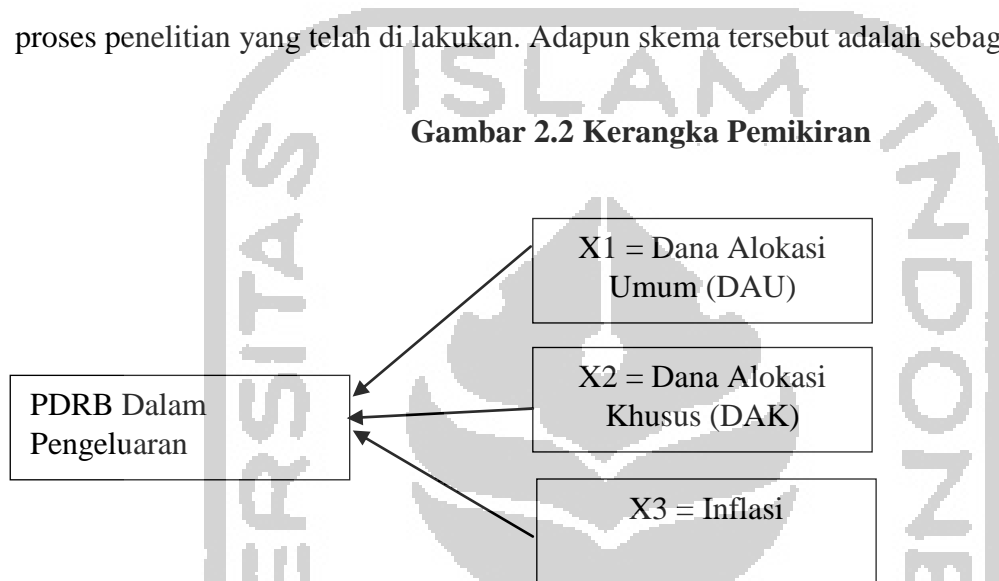
$P_{n,i} Q_i$ = Nilai konsumsi jenis barang ke-i pada periode ke-n

$P_{(n-1)i} Q_i$ = Nilai konsumsi jenis barang ke-i pada periode ke-(n-1)

K = Jumlah jenis barang paket komoditi

2.3 Kerangka pemikiran

Dalam suatu kerangka pemikiran merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan tentang grand theory dari seluruh bagian dasar teori dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka penelitian ini dapat digambarkan dengan skema singkat yang mengenai proses penelitian yang telah dilakukan. Adapun skema tersebut adalah sebagai berikut :



2.4 Hipotesis

Dalam penelitian ini, analisis menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Variabel independen DAU diduga mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah pada Tahun 2013-2017
2. Variabel independen DAK diduga mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah pada Tahun 2013-2017
3. Variabel independen Inflasi diduga mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah pada Tahun 2013-2017